



AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)

Vol. 9 No. 1 (2025)



"Dakwah dan Praktik Moderasi Beragama di Minangkabau: Sebuah Kajian Sosial-Budaya"

Zainul Wahab

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri_Indonesia

* aby.amyzawa@gmail.com

Abstrak

Moderasi beragama menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kerukunan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic, dan merupakan bagian integral dari kebijakan negara dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah keragaman yang ada. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk beragama beragam, memiliki tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dengan pencegahan ekstremisme. Artikel ini mengkaji regulasi moderasi beragama di Indonesia, dengan fokus pada implementasinya di Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam kajian ini, penulis juga menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi regulasi moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah mengenai moderasi beragama diterjemahkan dalam praktik kehidupan beragama masyarakat Minangkabau, serta upaya-upaya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat moderasi beragama melalui kebijakan pendidikan, dakwah, dan pembentukan norma sosial yang inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung moderasi beragama, tantangan dalam implementasinya masih besar, terutama terkait dengan adat, budaya, dan dinamika sosial setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk memperkuat moderasi beragama di daerah ini.

Abstract

Religious moderation is an important effort to maintain harmony and diversity in pluralistic Indonesian society, and is an integral part of state policy in maintaining harmony in religious life amidst existing diversity. Indonesia, as a country with a diverse religious population, has challenges in creating a balance between religious freedom and preventing extremism. This article examines religious moderation regulations in Indonesia, with a focus on their implementation in Minangkabau, West Sumatra. In this study, the author also highlights the challenges and obstacles faced in implementing religious moderation regulations in Indonesia. This research uses qualitative methods with a case study approach to understand how government policies and regulations regarding religious moderation are translated into the religious life practices of the Minangkabau people, as well as regulatory efforts made by the government to strengthen religious moderation through educational policies, da'wah, and the formation of social norms. inclusive. The research results show that although there are regulations that support religious moderation, challenges in implementing them are still large, especially related to local customs, culture and social dynamics. Therefore, collaboration between the government, community and religious leaders is needed to strengthen religious moderation in this area.

Kata kunci : Moderasi Beragama, Regulasi, Kebijakan, Indonesia, Ekstremisme, Keragaman Agama Minangkabau, kerukunan, pluralisme.

PENDAHULUAN

Minangkabau, sebuah wilayah dengan tradisi budaya yang kuat dan kedalaman intelektual yang tinggi, telah lama dikenal sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam di Indonesia. Di balik tradisi sosial yang ada, terdapat pengaruh kuat dari pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam dan memperkenalkan nilai-nilai ideologi Islam kepada masyarakat. Dalam konteks ini, gerakan perubahan sosial yang terjadi di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh perkembangan ideologi Islam yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan dengan keberagaman agama, suku dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan pencegahan ekstremisme agama dan memiliki tantangan besar dalam menciptakan harmoni sosial. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk memastikan keberagaman agama dapat diterima dan dihormati tanpa menyebabkan konflik yang mengedepankan prinsip-prinsip toleransi, saling menghargai, dan menghindari ekstremisme dalam praktik beragama.

Minangkabau, sebagai salah satu suku yang mayoritas beragama Islam, memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat, dengan adat Minangkabau yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi moderasi beragama di Indonesia perlu dianalisis dengan melihat bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dan dipraktikkan di Minangkabau, serta melihat fungsi dari moderasi beragama bukan hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berhubungan dengan regulasi negara yang mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan toleran. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, berupaya membentuk pola pikir masyarakat yang moderat dalam beragama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak tatanan sosial terutama di Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait regulasi dan praktik moderasi beragama serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut.

Pendekatan Teoritis:

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan kajian teori sosial budaya dan agama, dengan fokus pada teori moderasi beragama dan teori pluralisme. Konsep moderasi beragama akan dipahami dalam konteks hubungan antara agama dan budaya serta interaksi sosial di masyarakat Minangkabau.

Studi Kasus:

Penelitian ini bersifat studi kasus pada masyarakat Minangkabau, dengan fokus pada regulasi agama yang diterapkan baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga keagamaan, serta praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lokasi Penelitian:

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di daerah yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebudayaan Minangkabau, seperti Kota Padang, Bukittinggi, dan daerah pedesaan di sekitar Minangkabau.

Populasi Penelitian:

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau yang terdiri dari berbagai lapisan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta berbagai latar belakang sosial dan budaya, yang menjalani kehidupan beragama di Sumatera Barat.

Sampel Penelitian:

Sampel penelitian ini akan terdiri dari: Tokoh agama di Minangkabau (ulama, kiai, guru agama) Pemangku adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan nilai-nilai budaya Minangkabau Masyarakat umum dari berbagai kalangan (petani, pedagang, pegawai, mahasiswa) yang dapat mewakili berbagai segmen sosial masyarakat Minangkabau

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), dengan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam menjalani praktik keagamaan dan keterlibatan dalam aktivitas sosial-budaya.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara ini akan dilakukan dengan tokoh agama,

pemangku adat, dan tokoh masyarakat untuk menggali pandangan mereka mengenai moderasi beragama di Minangkabau, serta bagaimana regulasi agama diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Observasi Partisipatif:

Peneliti akan terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau untuk mengamati praktik moderasi beragama dalam konteks sosial-budaya, seperti dalam acara adat, perayaan keagamaan, atau kegiatan komunitas.

Studi Dokumentasi:

Peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen terkait regulasi agama, seperti peraturan daerah, fatwa-fatwa, dan dokumentasi keagamaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Studi ini juga akan mencakup literatur yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan agama di Minangkabau.

Focus Group Discussion (FGD):

Diskusi kelompok terfokus ini akan dilakukan dengan beberapa kelompok masyarakat yang mewakili beragam latar belakang sosial untuk menggali persepsi mereka tentang moderasi beragama serta pengaruh regulasi agama terhadap kehidupan mereka.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif Kualitatif:

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan FGD akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan gambaran rinci tentang praktik moderasi beragama di Minangkabau dan bagaimana regulasi agama mempengaruhinya. Analisis ini bertujuan untuk menggali tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dalam data.

Koding Tematik:

Dalam menganalisis data wawancara dan FGD, peneliti akan menggunakan teknik koding tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori yang muncul. Tema yang mungkin muncul antara lain terkait dengan pengertian moderasi beragama, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik moderasi beragama, serta tantangan dan hambatan dalam penerapan moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap yang menghindari ekstremisme baik di sisi kanan maupun kiri dalam praktik beragama. Definisi moderasi beragama dapat beragam, namun secara umum merujuk pada upaya untuk mengedepankan pemahaman yang inklusif, toleran, dan menjaga kedamaian antar umat beragama.

Menurut para ahli, moderasi beragama bertujuan untuk menghindari interpretasi agama yang rigid dan sempit, serta menekankan pada prinsip-prinsip universal agama yang mengajarkan kedamaian dan harmoni antar sesama manusia.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama juga berkaitan erat dengan ideologi Pancasila yang menegaskan bahwa agama tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan perdamaian.

Sosial dan Kultural dalam Konteks Minangkabau, sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan tradisi dan kebudayaan yang khas, memiliki praktik beragama yang unik, di mana tradisi adat dan agama saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, teori sosial dan kultural yang relevan adalah:

Adat Minangkabau dan Agama Islam: Dalam masyarakat Minangkabau, adat (tradisi) dan agama Islam berjalan beriringan. Konsep moderasi beragama di Minangkabau tidak hanya mengacu pada pengaturan dalam agama, tetapi juga bagaimana adat-istiadat Minangkabau mempengaruhi cara masyarakat menjalankan agama secara moderat. Adat Minangkabau yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang moderat dalam beragama.

Kearifan Lokal (Local Wisdom): Teori ini berfokus pada bagaimana kearifan lokal berperan dalam membentuk sikap dan praktik moderasi beragama. Masyarakat Minangkabau yang menghargai keseimbangan antara agama dan budaya lokal memiliki peran penting dalam mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal ini dapat menjadi dasar regulasi yang menyeimbangkan antara kepercayaan agama dan adat.

Regulasi Moderasi Beragama di Indonesia

1. Kebijakan Pemerintah

Sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong moderasi beragama. Salah satu yang paling menonjol adalah "Gerakan Moderasi

Beragama" yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Indonesia. Kebijakan ini menekankan pada pentingnya pendidikan beragama yang tidak hanya mengutamakan ritual agama, tetapi juga pembentukan karakter yang moderat. menyadari pentingnya menciptakan kerukunan umat beragama dalam negara yang majemuk. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mencanangkan program moderasi beragama yang mencakup prinsip-prinsip seperti:

- 1) Toleransi – Menghargai perbedaan agama dan keyakinan.
- 2) Anti-radikalisasi – Menanggulangi ekstremisme agama yang dapat menimbulkan kekerasan.
- 3) Peningkatan kerukunan – Mendorong interaksi positif antar umat beragama.

Selain itu, Kementerian Agama juga mendorong para ulama dan pendakwah untuk menyebarkan dakwah yang mengutamakan toleransi, perdamaian, dan kebersamaan antar umat beragama. Pemerintah juga berperan dalam menanggulangi radikalisme dengan memberikan pelatihan kepada aparatur negara tentang pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila. Juga memberikan Kebijakan: Pembentukan Forum Dialog Antar Agama di Setiap Daerah Pemerintah dapat membentuk dan memfasilitasi forum-forum dialog antar agama, terutama di daerah-daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi, seperti Minangkabau. Forum ini bisa melibatkan tokoh agama, masyarakat, serta pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan pemahaman antar agama yang saling menghormati dan menghindari ketegangan dan meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan sosial yang lebih baik.

2. Regulasi dalam Pendidikan Agama

Salah satu upaya utama dalam mewujudkan moderasi beragama adalah melalui sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan agama di Indonesia diatur dalam kurikulum yang menekankan pada pembelajaran agama yang moderat. Sekolah-sekolah di Indonesia, baik yang berbasis agama maupun umum, diharapkan memberikan pemahaman yang inklusif terhadap agama-agama yang ada, serta menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, sehingga melahirkan generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang moderat dan siap untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan umat beragama lainnya, menghindari tindakan ekstrem atau intoleransi.

Dalam konteks Minangkabau, pendidikan agama harus memperhatikan kearifan lokal yang sudah terintegrasi dengan nilai-nilai

budaya masyarakat setempat. Pemerintah dapat mendorong pengajaran yang mengharmonikan antara ajaran agama Islam dengan nilai-nilai adat Minangkabau, seperti musyawarah dan mufakat, yang mendukung moderasi beragama, dengan tujuan meningkatkan relevansi pendidikan agama dengan budaya setempat, sehingga memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama dalam konteks sosial budaya yang lebih luas.

3. Dakwah yang Moderat

Dakwah di Indonesia, yang menjadi sarana penting untuk menyebarkan nilai-nilai agama, perlu dijalankan dengan pendekatan yang moderat. Dalam hal ini, regulasi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa dakwah yang disampaikan tidak mengarah pada ekstremisme atau intoleransi. Oleh karena itu, ada pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai tata cara berdakwah yang mengutamakan moderasi beragama.

Pemerintah juga mendorong para ulama untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat dakwah, dengan cara yang positif, moderat, dan mengedepankan kebersamaan, serta berusaha untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengutamakan eksklusivitas. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyampaian pesan agama yang bisa diterima oleh seluruh umat, tanpa memaksakan satu pemahaman atau interpretasi agama tertentu. Di Minang kabau, dakwah ini tidak hanya berfokus pada pengajaran agama Islam, tetapi juga menghormati dan menghargai kepercayaan adat yang sudah ada, serta menjaga kedamaian antara umat Islam dan umat beragama lainnya supaya bisa menghindari polarisasi sosial dan memastikan bahwa dakwah dapat diterima secara luas oleh masyarakat yang beragam, baik secara agama maupun budaya. Dalam masyarakat Minangkabau, tokoh agama dan masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan dakwah yang moderat. Mereka dapat memanfaatkan posisi mereka untuk menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, dakwah yang dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat haruslah mencerminkan sikap moderat yang menghargai keragaman dan mengutamakan perdamaian. Mereka juga perlu menyosialisasikan pentingnya moderasi beragama kepada generasi muda melalui berbagai forum dan kegiatan sosial dan melakukan Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi dalam beragama dan memperkuat kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat yang plural.

Dakwah juga menekankan pada pentingnya pemahaman agama

yang tidak ekstrem, yang menghindari penafsiran-penafsiran yang bisa memicu radikalisasi. Dakwah moderat mengajak umat untuk memahami agama dalam konteks zaman yang terus berkembang, serta mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan, baik dalam ajaran agama maupun praktiknya. Di Minangkabau, di mana adat dan agama saling terjalin erat, dakwah moderat akan berusaha untuk mengharmoniskan ajaran Islam dengan adat setempat yang penuh dengan nilai-nilai musyawarah dan mufakat, sehingga mencegah radikalisasi dan mendorong pemahaman yang damai serta penuh toleransi terhadap sesama umat beragama.

Pemerintah, bersama dengan lembaga keagamaan, dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dakwah di Indonesia, termasuk di Minangkabau, untuk memastikan bahwa dakwah yang disampaikan tidak menyebarkan kebencian atau radikalisasi. Evaluasi ini bisa mencakup pengawasan terhadap isi ceramah, khutbah, atau materi dakwah yang disampaikan kepada masyarakat, supaya Menjamin bahwa dakwah yang disampaikan di Indonesia, khususnya di Minangkabau, tetap berada dalam jalur moderat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tidak mengarah pada kekerasan atau perpecahan sosial.

4. Pembentukan Norma Sosial yang Inklusif

Regulasi juga mencakup pembentukan norma sosial yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus berupaya menciptakan dialog antar umat beragama. Norma sosial yang inklusif dan toleran menjadi dasar yang penting untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.

Moderasi Beragama di Minangkabau

Minangkabau, dengan adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah (adat bersandar pada agama, agama bersandar pada Al-Qur'an), memiliki cara pandang yang khas dalam menjalankan kehidupan beragama. Di daerah ini, Islam telah berasimilasi dengan adat Minangkabau, yang menekankan prinsip kekeluargaan, gotong-royong, dan musyawarah. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan semangat kebersamaan dan kerukunan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

I. Perbedaan interpretasi agama – Terdapat variasi dalam pemahaman

dan praktik agama, yang kadang menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok tertentu.

- II. Ketegangan antara adat dan agama – Meskipun agama Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat sering kali mengambil peran dominan dalam beberapa aspek sosial, yang terkadang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.
- III. Penyebaran paham radikal – Walaupun secara umum Minangkabau dikenal sebagai daerah yang moderat, terdapat kelompok-kelompok kecil yang terpengaruh paham radikal, terutama melalui pengaruh media sosial.

Namun, meskipun ada tantangan tersebut, masyarakat Minangkabau secara umum berupaya menjaga keseimbangan antara adat dan agama, dengan mengedepankan nilai-nilai seperti musyawarah, saling menghargai, dan gotong-royong.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Moderasi Beragama

Pemerintah daerah Sumatera Barat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama di Minangkabau. Program-program pemerintah yang mendukung moderasi beragama di tingkat lokal perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- ❖ **Pendidikan agama yang inklusif** – Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama di tingkat sekolah.
- ❖ **Dialog antar agama** – Meningkatkan dialog antara pemuka agama dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman terhadap moderasi beragama.
- ❖ **Penguatan lembaga keagamaan lokal** – Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan lokal untuk menjadi agen moderasi dan anti-radikalisasi.
- ❖ **Menyusun Kebijakan yang Inklusif dan Seimbang** Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendorong kehidupan beragama yang moderat, inklusif, dan mengutamakan toleransi. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik tidak memihak pada satu agama tertentu, serta memberikan ruang yang adil bagi setiap agama untuk berkembang dan dipraktikkan.
- ❖ **Pendidikan Moderasi Beragama** Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan pemerintah adalah pendidikan. Pemerintah melalui lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi

beragama dalam kurikulum, baik di sekolah umum maupun di sekolah agama. Hal ini akan membentuk generasi yang lebih terbuka, toleran, dan memahami perbedaan.

- ❖ **Fasilitasi Dialog Antaragama** Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antaragama untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar umat beragama. Dengan menciptakan ruang untuk berbicara dan bertukar ide antar umat beragama, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan membangun rasa saling menghargai.
- ❖ **Penegakan Hukum dan Keamanan** Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, salah satunya dengan menegakkan hukum yang melarang segala bentuk diskriminasi agama. Ketegasan dalam menangani tindakan intoleransi atau kekerasan yang berbasis agama adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kehidupan beragama tetap dalam koridor moderasi.
- ❖ **Mendorong Kerjasama Internasional** Selain memperkuat internal, pemerintah Indonesia juga dapat memperkuat moderasi beragama melalui kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam rangka memperjuangkan toleransi dan moderasi beragama di tingkat global. Hal ini sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan menghargai perbedaan.

Peran Masyarakat dalam Moderasi Beragama

- **Menjaga Keharmonisan Antar Umat Beragama** Masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan suasana harmonis di lingkungan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan agama, serta menghindari tindakan atau ucapan yang memprovokasi ketegangan antar umat beragama, masyarakat dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan moderasi beragama.
- **Peningkatan Pemahaman Agama yang Benar** Masyarakat harus berusaha memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam dan moderat, menghindari interpretasi yang ekstrim atau intoleran. Diskusi-diskusi dalam lingkup komunitas agama yang lebih terbuka, serta pembelajaran agama yang berbasis pada pemahaman universal tentang kebaikan dan kedamaian, dapat membantu mengurangi radikalisme dalam masyarakat.
- **Menghargai Perbedaan dan Menghormati Hak Asasi** Masyarakat perlu menyadari bahwa perbedaan agama adalah bagian dari

kekayaan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk saling menghargai hak beragama setiap individu, tidak hanya terbatas pada hak untuk beribadah, tetapi juga dalam memilih keyakinan dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya.

- **Aktif dalam Kegiatan Keagamaan yang Positif** Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan keagamaan yang mendorong sikap moderat, seperti kegiatan interfaith (antaragama), pembelajaran lintas agama, dan kegiatan sosial yang menyatukan umat beragama dalam membantu sesama tanpa membedakan agama. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mempererat hubungan antarumat beragama serta mempromosikan toleransi dan perdamaian.
- **Membangun Kesadaran Sosial** Sebagai bagian dari komunitas, masyarakat harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan kesadaran sosial tentang pentingnya moderasi beragama. Mereka dapat melibatkan diri dalam diskusi publik, kampanye tentang toleransi, dan mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong moderasi beragama.

Selain itu, masyarakat Minangkabau harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tantangan dalam Regulasi Moderasi Beragama

Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaksanaan moderasi beragama di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan konsep moderasi beragama dan cenderung mempertahankan paham yang lebih konservatif atau ekstrem. Selain itu, ada tantangan dari penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, yang seringkali membawa pesan-pesan intoleransi dan radikalisme. Regulasi yang ada harus dapat menjawab tantangan ini dengan lebih adaptif dan dinamis. Di samping itu, pengawasan terhadap kegiatan dakwah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemuka agama untuk memastikan bahwa moderasi beragama dapat terwujud dengan baik.

PENUTUP

Regulasi moderasi beragama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberagaman agama dan mencegah ekstremisme, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang

mendukung moderasi beragama melalui pendidikan, dakwah, dan pembentukan norma sosial yang inklusif. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menentang moderasi beragama. Di Minangkabau, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengintegrasikan moderasi beragama dengan budaya adat yang sudah terjalin kuat. Meskipun demikian, dengan adanya dukungan dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, moderasi beragama dapat menjadi landasan penting untuk menjaga kerukunan dan perdamaian sosial di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Gramsci, A. (2020).** *Hegemoni dan Perubahan Sosial: Teori dan Aplikasi dalam Konteks Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo, A. (2021).** *Islam, Masyarakat, dan Perubahan: Perspektif Sosial dalam Dunia Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Nasr, S. H. (2023).** *Islamic Spirituality and Social Change: The Role of Religious Institutions in Shaping Society*. New York: Oxford University Press.
- Schielke, S. (2020).** *Reformasi Agama dan Sosial: Pemikiran Islam dalam Konteks Sosial Kontemporer*. Jakarta: Serambi.
- Durkheim, E. (2021).** *The Division of Labor in Society: Revisiting Social Solidarity*. New York: Free Press.
- Nurdin, R. (2020).** "Ideologi Islam dalam Gerakan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Minangkabau." *Jurnal Studi Islam*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Gerakan Moderasi Beragama: Pedoman dan Arah Kebijakan*.
- Al-Qaradawi, Y. (2023). *Fiqh al-Awlawiyyat*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2019). *Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2017). *Fatwa tentang Moderasi Beragama*.
- Nasution, H. (2019). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Sosial*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020).** *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*.
- MUI. (2021).** *Fatwa MUI tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Kebudayaan Minangkabau. (2019).** *Adat dan Agama dalam Kehidupan Sosial Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Sudirman, A. (2022).** *Moderasi Beragama di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qurtuby, S. (2017).** *Moderasi Beragama di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amal, M. R. (2019).** *Pendidikan Toleransi dan Moderasi Beragama di*

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dewi, R. A., & Sudarsono, S.** (2021). "Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah: Peran Kurikulum dalam Membangun Toleransi". *Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 45-58.
- Fauzan, F.** (2020). *Moderasi Beragama dan Pembangunan Sosial: Menyikapi Radikalisasi dan Intoleransi*. Bandung: Mizan.
- Masykur, A.** (2022). "Peran Pemerintah dalam Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 29(1), 67-80.
- Nasution, I. M.** (2020). *Pengaruh Moderasi Beragama terhadap Toleransi Sosial di Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, M. S.** (2021). "Masyarakat dan Peranannya dalam Mewujudkan Moderasi Beragama". *Jurnal Studi Agama*, 18(3), 112-125.
- Wahid, A.** (2018). *Islam, Toleransi, dan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni di Indonesia*. Jakarta: LKiS.
- Zainuddin, M.** (2019). "Peran Masyarakat dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Era Digital". *Jurnal Sosial dan Budaya*, 23(4), 235-247.